

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Penelitian

Banten adalah sebuah wilayah di ujung barat pulau Jawa yang memisahkan diri dari Jawa Barat pada tahun 2000 dengan menjadi provinsi baru pertama di Indonesia. Banten pada masa lalu merupakan kesatuan politik berbentuk kesultanan yang pernah berjaya setidaknya dari tahun 1526 M sampai 1828 M. Banten merupakan bagian dari keragaman suku dan tradisi Indonesia, termasuk dalam gaya kepemimpinan tradisionalnya. Kepemimpinan tradisional diakui keberadaannya oleh negara dan yang tidak kalah pentingnya adalah diakui oleh masyarakat lokal, meskipun tidak terikat secara hukum-hukum positif negara, kepemimpinan tradisional masih sangat efektif dalam kaitannya dengan masyarakat Banten. Banten adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan karakteristik budaya yang relatif tinggi.

Banten merupakan sebuah provinsi dimana pengaruh elit kulturalnya masih melekat di berbagai aspek kehidupan masyarakat, dalam hal ini salah satunya adalah Jawara. Definisi dan pengertian Jawara, terdapat stigma negatif dari masyarakat Indonesia dalam memaknai definisi dan pengertian Jawara, Jawara kerap kali diasosiasikan baik secara individu maupun kelompok sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan fisik yang kuat, mempunyai kemampuan bela diri yang hebat, berwatak kasar, sering menggunakan kekerasan, dan bahkan dikatakan sebagai bandit sosial. Sejauh ini terdapat beberapa definisi pengertian-pengertian yang berbeda mengenai Jawara yang dikemukakan oleh beberapa peneliti, seperti misalnya Kartodirdjo (1984) dalam bukunya yang berjudul *Pemberontakan Petani Banten 1888* menggambarkan Jawara dengan citra negatif, dalam pengertiannya mengenai Jawara yang digambarkan sebagai elit pedesaan di Banten yang menembus batas-batas hirarki sosial, Jawara biasanya menjadi pemberontak, tidak memiliki pekerjaan tetap, sering terlibat dalam kegiatan kriminal seolah tidak hidup dalam hukum dan aturan yang berlaku, dan disebut sebagai bandit sosial.

Sedangkan menurut Abrori (2003) dalam Tesisnya yang berjudul *Perilaku Politik Jawara dalam Proses Politik di Banten*, Jawara adalah figur seorang pahlawan Banten yang memiliki kekuatan fisik dan keberanian yang luar biasa karena kemampuannya dalam mempelajari ilmu silat dan kadigjayaan. Jawara sebagai salah satu elit kultural di Banten selain Kyai yang memiliki pengaruh, dimana dalam proses perjalanannya dipolitik lokal Banten mengalami mobilitas vertikal, khususnya pasca-Reformasi yang menjadi masa keemasan bagi Jawara, dimana terjadi sebuah sinergitas antara Jawara dengan penguasa dalam lingkup pemerintahan lokal. Jawara mempengaruhi bahkan sebagian mengokupasi politik lokal dengan terlibat langsung dalam prosedur demokrasi melalui pemilihan umum, bahkan intervensi sampai pada level birokrasi pemerintahan (Romli, 2018, p. 7). Secara historis, penghormatan masyarakat Banten kepada Jawara ini sangat bisa dimengerti dan dipahami jika kita mengetahui rekam jejaknya dikepemimpinan mereka pada masa lalu. Berbagai macam pemberontakan yang pernah terjadi di Banten dimasa lalu, seperti misalnya pada peristiwa *Pemberontakan Petani Banten 1888* dan *Pemberontakan Kelompok Komunis 1926* menjadi bukti yang terukir dalam sejarah lokal Banten terkait peran Jawara dalam meredakan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Pada masa itu, Jawara menjadi sebuah simbol perlawanan dan “*balance of power*“ dalam merebut hak-hak atas tanah dan pekerjaan masyarakat Banten. Artinya, peranan Jawara ini telah lama ada sejak peperangan melawan penjajah kolonial Belanda. Jawara yang terkenal dengan kekuatan magis dan kesaktikannya berperan besar bagi masyarakat dalam melawan pemerintahan kolonial yang telah merampas hak-hak masyarakat dan membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit, karena besarnya peranan tersebut membuat masyarakat sangat menghormati bahkan sampai ada yang memuja Jawara sebagai orang keramat (Abrori, 2003). Peranan tersebut bagi masyarakat Banten yang pernah ada dalam suatu masa pergolakan yang cukup lama, memiliki signifikansi yang tinggi sehingga Jawara mendapatkan sebuah prestise (kehormatan sosial) dengan menjadi elit kultural dalam struktur masyarakat Banten yang terus berkesinambungan.

Fondasi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri telah ditetapkan dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang

otonomi daerah. Selain itu, pembentukan keanggotaan DPRD dan kepala daerah didasarkan pada aturan otonomi daerah yang mengatur tentang pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif bukan lagi melalui penunjukan dan pengangkatan (Marbun, 2010, p. 10). Hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat 3 dan 4 UUD 1945. Dengan berlakunya Pasal 18 UUD 1945, telah merubah situasi politik ditingkat lokal yang telah memicu para elit lokal untuk bersaing dalam kontestasi ajang perebutan kekuasaan. Reformasi politik yang ditandai oleh jatuhnya rezim otoriter, sebuah sistem pemilihan umum yang merupakan hasil dari otonomi daerah. Terjadinya desentralisasi politik atau penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah merupakan salah satu instrumen tujuan dari Pilkada yang kemudian menjelma menjadi suatu sistem. Pilkada, seperti halnya pemilu nasional menjadi metode demokrasi untuk memilih dan mengganti rezim pemerintahan. Rakyat dapat langsung memilih pemimpin daerahnya melalui pilkada, yang juga memberikan legitimasi kepada siapa saja yang layak dan mampu memimpin. Dengan kata lain, pilkada adalah seperangkat pedoman atau cara bagi warga untuk memutuskan bagaimana suatu pemerintahan yang sah akan berjalan di masa depan (Naskah Akademik UU Pilkada, 2022, pp. 1-2).

Maksud dibalik pelaksanaan pilkada langsung adalah untuk membenahi sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Akibatnya, demokrasi menjadi salah satu yang berakar langsung pada pilihan yang dibuat oleh rakyat (pemilih). Alhasil, keputusan politik untuk melaksanakan pilkada merupakan langkah strategis untuk memperluas, memperdalam, dan meningkatkan demokrasi. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, yang mengakui upaya masyarakat lokal (daerah) untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Pilkada harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap agenda desentralisasi jika dilihat dalam konteks yang lebih besar yaitu demokratisasi kehidupan bangsa.

Berdasarkan argumentasi tersebut, pilkada menjadi sebuah demokratisasi yang mampu memperkuat otonomi daerah karena asas desentralisasi berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri berdasarkan

aspirasi masyarakat, khususnya dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan dari uraian tentang otonomi daerah dan pilkada tersebut, selanjutnya akan dipaparkan tentang peran Jawara dalam perpolitikan provinsi Banten. Peranan Jawara kemudian menjadi sangat dominan pengaruhnya dimasa modern Banten, terlebih dalam keterlibatan Jawara didunia perpolitikan (politik praktis) di Banten. Seperti misalnya dalam sejarah terbentuknya provinsi Banten, tidak lepas dari peranan Jawara yang menempatkan H. Tubagus Chasan Sohib yang merupakan tokoh dikalangan para Jawara, yang juga sekaligus ayah kandung dari Hj. Ratu Atut Chosiyah. Kemudian, yang menjadi menarik adalah sejak Banten memisahkan diri dari Jawa Barat dan menjadi daerah yang otonom, yang kemudian dijadikan sebagai sebuah momentum oleh para aktor-aktor lokal untuk bisa berkuasa di Banten, dimana dalam konteks ini adalah para elit kultural Banten yang merasa dirinya mempunyai legitimasi untuk berkuasa karena sebuah prestise atau “keistimewaan“ didalam struktur masyarakat Banten yang terbentuk dari hasil proses berkesinambungan melalui sebuah rangkaian sejarah dan budaya didalam kehidupan sosial masyarakat Banten, salah satunya yaitu Jawara. Elit kultural ini secara luas dan nyata mengambil bagian kedalam politik formal, karena melihat adanya sebuah ruang dan peluang yang besar dari terbentuknya pemerintahan di Banten dan bersikap secara terang-terangan berhadapan dengan para aktor politik modern, seperti misalnya partai politik.

Akan tetapi, dalam konteks pilkada provinsi Banten Jawara tidak memposisikan diri sebagai kelompok yang ikut dalam kontestasi perebutan kekuasaan Banten, tetapi lebih sebagai pendukung yang militan dan mendulang/mencari suara sebanyak-banyaknya untuk para calon pemegang kekuasaan yang ia bela, dengan menjadi tim sukses dari calon tersebut. Jawara dianggap bisa memberikan andil besar dalam membawa dukungannya memenangkan kontestasi perebutan kekuasaan di tingkat lokal, seperti yang dikemukakan oleh Lubis (2003, p. 26) karena kedudukan Jawara sebagai elit kultural dalam struktur sosial masyarakat Banten menjadi sebuah modal dan juga dinilai memiliki kharisma istimewa terutama pada level lapisan bawah masyarakat Banten.

Pada umumnya didaerah-daerah kejawaraan itu menjadi suatu identitas sekelompok orang, (khususnya di Banten) Jawara menjadi salah satu unsur dalam masyarakat dan menempati kedudukan yang berpengaruh khususnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Seperti halnya Kyai yang memiliki kedudukan dan pengaruh yang besar bagi masyarakat Banten, Jawara juga bisa mempengaruhi dinamika sosial masyarakat. Selain itu, Jawara juga memiliki unsur yang menjadi pembeda dengan elemen-elemen masyarakat pada umumnya, seperti misalnya wanten (berani), agresif, sompral (tutur kata keras), dan blak-blakan (terbuka/apadanya). Unsur-unsur itu yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik dengan dielaborasi dalam balutan keterampilan bela diri (silat) dan kedigjayaan atau kesaktian (Alamsyah, 2010, p. 65).

Keberadaan Jawara sebagai elit kultural yang mempunyai pengaruh besar pada masyarakat Banten itulah yang menjadi indikator kekuatan politik dari Jawara. Kekuatan Jawara dapat mempengaruhi putusan-putusan politik apabila keputusan yang dibuat menyangkut dengan kepentingan (*interest*) mereka (Hidayat, 2007, p. 268). Untuk itu, sebagai kekuatan politik, Jawara seringkali melakukan tawar-menawar untuk memaksimalkan sumber-sumber kekuasaan dan memilih saluran yang tepat dan efisien untuk menyampaikan aspirasi kepentingannya.

Jawara dijadikan sebagai tim sukses dalam pilkada provinsi Banten dalam upaya komunikasi dan mobilisasinya untuk meraih suara. Pemilihan gubernur Banten pada tahun 2001, yang ditandai dengan pengangkatan anak H. Tubagus Chasan Sohib, yaitu Hj. Ratu Atut Chosiyah sebagai Wakil Gubernur, mengawali dominasi kelompok Jawara. Hj. Ratu Atut Chosiyah mendapat dukungan kuat dari para Jawara dan bahkan terus membela mantan Gubernur Banten itu ketika terlibat kasus korupsi di KPK. Sebagai bentuk dukungan dan pembelaan terhadap Gubernur Hj. Ratu Atut Chosiyah yang ditetapkan sebagai tersangka, ribuan Jawara dari berbagai wilayah provinsi Banten datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Sebagai sebuah kelompok atau komunitas Jawara mengembangkan budayanya sendiri, yang agak berbeda dari budaya dominan masyarakat Banten. Mereka telah

mengembangkan sub-kultur mereka sendiri dengan seperangkat keyakinan, nilai, dan standar mereka sendiri, yang menjadi landasan bagi mereka dalam menjalani aktivitas sosial. Kedudukan yang dimainkan oleh para Jawara ini sangat menentukan dalam hal sosial, ekonomi dan politik kehidupan masyarakat Banten, hal tersebut tentunya mengalami peningkatan peranan yang signifikan jika dibandingkan dengan peranannya dimasa-masa lalu dalam sejarah kehidupan masyarakat Banten.

Jawara adalah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah peradaban Banten adalah Jawara. Kehebatan Jawara mewarisi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ia menjadi pilar penting bersama ulama dalam perjuangan kemerdekaan di Banten. Alhasil, ia dianggap sebagai sosok yang berpengaruh karena kemampuannya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dewasa ini, peranan Jawara yang cukup vital dalam dunia politik, dapat dikatakan sangat menentukan masa depan masyarakat Banten. Hingga saat ini elit kultural yang disebut sebagai Jawara atau dikenal juga dengan Pendekar Banten ini masih mendominasi dunia perpolitikan lokal Banten setidaknya dalam kontestasi perebutan kekuasaan di pilkada Banten pengaruh dari Jawara masih sangat dibutuhkan untuk mendulang suara, hal tersebut yang juga akhirnya menjadi problematika di Banten, dimana kemudian itu menjadi sebuah akar dari fenomena dinasti politik yang banyak terjadi di wilayah Banten.

Setidaknya penulis menemukan satu tulisan yang memiliki bahasan serupa dengan topik yang akan dibahas, yaitu mengenai peranan Jawara dalam perpolitikan lokal Banten, yaitu buku yang berjudul *Islam, Jawara, dan Demokrasi: Geliat Politik Banten Pasca-Orde Baru* karya Andi Rahman Alamsyah yang diterbitkan oleh Dian Rakyat. Dalam buku tersebut, menjelaskan tentang bagaimana fenomena demokrasi yang terjadi di Banten, yang dinilai mempunyai keunikan dari demokrasi pada umumnya sebagai akibat karena adanya intrik kekerasan para Jawara Banten. Persamaannya dengan penelitian ini adalah mempunyai kepedulian yang sama terkait keterlibatan Jawara dengan politik lokal di Banten dan konteks waktu penelitiannya, yaitu pasca-Orde Baru. Sedangkan perbedaan buku tersebut dengan

penelitian ini adalah dalam buku tersebut tidak dijelaskan secara jelas bagaimana perilaku politik dan peranan Jawara dalam kontestasi perebutan kekuasaan di pilkada Banten. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada pembahasan yang menggambarkan bagaimana peranan dan perilaku politik Jawara di pilkada Banten tahun 2001 dan 2006, serta akan menjelaskan apa motif dukungan dari Jawara Banten kepada Hj. Ratu Atut Chosiyah dan apa timbal baliknya bagi para Jawara Banten.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Setelah penjabaran yang telah dikemukakan, dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah yang mencakup batasan temporal dan spasial, dengan adanya pembatasan ini penulis bisa fokus mendalami masalah yang diangkat dan masalah penelitiannya tidak melebar pada permasalahan lainnya. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah peran Jawara dalam membantu Hj. Ratu Atut Chosiyah memenangkan kontestasi perebutan kekuasaan di pilkada Banten tahun 2001 dan 2006.

Pembatasan temporal dalam penelitian ini memakai 2 konteks peristiwa, yaitu pada tahun 2001 dan 2006, karena pada tahun 2001 merupakan tahun dimana Hj. Ratu Atut Chosiyah memulai kancah politiknya di pilkada Banten sebagai calon wakil gubernur, lalu kemudian batasan akhir dari penelitian ini adalah tahun 2006 dimana periode tersebut adalah periode Hj. Ratu Atut Chosiyah mengikuti kontestasi pilkada Banten sebagai calon Gubernur dan petahana.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, memunculkan tiga pertanyaan yang mendasar, yaitu :

1. Mengapa Jawara memberikan dukungan untuk Hj. Ratu Atut Chosiyah di Pilkada Banten tahun 2001 dan 2006?
2. Bagaimana peran dan upaya Jawara dalam memenangkan Hj. Ratu Atut Chosiyah di Pilkada Banten tahun 2001 dan 2006?

3. Apa yang didapatkan Jawara Banten ketika Hj. Ratu Atut Chosiyah sudah mendapatkan jabatannya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan Jawara Banten sebagai elit kultural, serta motif dan timbal balik apa yang didapatkan Jawara Banten dalam memenangkan Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam kontestasi perebutan kekuasaan di Banten, serta untuk mengetahui timbal balik yang didapatkan Jawara Banten setelah Hj. Ratu Atut Chosiyah sudah mendapatkan kekuasaannya.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sumbangsih pemikiran dibidang sejarah politik, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik, khususnya mengenai kajian tentang permasalahan yang berkaitan dengan faktor patronase yang diperankan oleh para aktor politik di era global ini yang melibatkan masyarakat sebagai objeknya, sehingga dapat dijadikan sebagai wawasan atau referensi keilmuan dalam bidang politik.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah stimulus dan terobosan baru bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumber pembelajaran sejarah pada perkuliahan di prodi Pendidikan Sejarah UNJ khususnya kajian sejarah politik tentang elit politik lokal, sejarah lokal, dapat digunakan sebagai studi kepustakaan dan sumber referensi bagi penelitian kesejarahan lainnya.

#### D. Kerangka Analisis

Dalam konteks untuk membuat penyajian yang sistematis, terarah, dan lebih komprehensif, tentunya harus dilandasi dengan analisis untuk dapat menjelaskan berbagai fenomena yang ada, berkaitan dengan peranan dan perilaku politik Jawara di pilkada provinsi Banten dan di birokrasi pemerintahan provinsi Banten.

Runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru membuka harapan untuk demokrasi sebagai sebuah pilihan yang paling realistis untuk Indonesia, ditandai dengan lahirnya sebuah Reformasi politik yang dihasilkan dari otonomi daerah, yaitu sebuah sistem pilkada. Pilkada menjadi sebuah sistem atau salah satu instrumen yang tujuannya untuk desentralisasi. Namun, secara substansial, terdapat beberapa anomali dalam demokrasi seperti ini dengan masih terlihatnya ciri-ciri zaman Orde Baru. Khususnya dalam konteks tulisan ini adalah politik lokal Banten, dominasi elit politik lokal masih tetap dikuasai oleh para Jawara. Jawara sebagai elit kultural mempunyai pengaruh besar pada masyarakat Banten dan menjadi kekuatan politik yang besar di tingkat politik lokal Banten. Kekuatan Jawara juga dapat mempengaruhi putusan-putusan politik, yang dibuat menyangkut dengan kepentingan mereka. Sebagai sebuah kekuatan politik seringkali Jawara melakukan tawar-menawar (jika dalam ilmu politik disebut teori *bargaining power*) dan penerimaan (*teori acceptance*), tentu saja dengan tujuan agar kekuatan politiknya itu bisa diarahkan dan ditempatkan pada sumber-sumber kekuasaan secara maksimal. Sebagai kelompok elit sosial masyarakat Banten, mereka (Jawara) biasanya mengatur siapa yang akan dimajukan dalam pemilihan. Dengan begitu, secara tidak langsung sebenarnya para Jawara ini dalam posisi yang memiliki otoritas dalam menentukan arah kebijakan dalam birokrasi Pemerintahan Provinsi Banten, yang kemudian tentu saja hal itu sangat menguntungkan bagi orang-orang yang bisa terafiliasi dengan kelompok tersebut. Seperti misalnya, pada saat memenangkan pemilihan gubernur Banten pertama tahun 2001, dengan meyakinkan PPP untuk bekerja sama dengan Golkar dalam ajang perebutan kekuasaan (pilkada), Jawara mampu menghancurkan koalisi PPP dan PDIP dengan strateginya. Chasan Sohib berhasil merebut perhatian Djoko Munandar sebagai

ketua DPD PPP Banten untuk mempromosikannya sebagai calon Gubernur bersama Hj. Ratu Atut Chosiyah. Dalam strategi pencalonan PPP dengan Golkar yang mencalonkan Djoko Munandar dengan Hj. Ratu Atut Chosiyah ini yang menjadi kekuatan politik dan mesin politik utamanya Golkar dan Jawa karena kapasitas mereka untuk mobilisasi massa.

Dominasi para Jawa yang kuat itu terjadi karena kuatnya dominasi mereka atas sumber daya ekonomi di Banten dengan memonopoli berbagai proyek konstruksi. Dewasa ini, peranan Jawa yang cukup vital dalam dunia politik, dapat dikatakan sangat menentukan masa depan masyarakat Banten.

## **E. Metode Penelitian dan Bahan Sumber**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam proses pembuatan penelitian ini adalah metode historis. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau. Hasil dari proses tersebut kemudian direkonstruksi menjadi penulisan sejarah (Gottschalk, 1968, p. 32). Dalam hal ini, metode historis memiliki beberapa langkah sebagai tahapan untuk menghasilkan penulisan sejarah yang komprehensif dan disusun secara kronologis yaitu: (1) pemilihan topik; (2) pengumpulan sumber; (3) verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan sumber); (4) interpretasi (analisis dan sintesis); dan tahapan yang terakhir adalah (5) penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013, p. 69). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

*Pertama*, pemilihan topik. Dalam menentukan topik atau pemilihan topik penelitian, menurut Kuntowijoyo (2013) dalam memilih topik penelitian sejarah sebaiknya dipilih berdasarkan atas dua kedekatan, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dari topik penelitian yang penulis ambil “Peran Jawa sebagai Elit Kultural dalam kemenangan Hj. Ratu Atut Chosiyah di pilkada Banten pada tahun 2001 dan 2006”, karena adanya kedekatan emosional, yang mana penulis merupakan warga asli Banten yang berharap bahwa nantinya tulisan ini bisa memberikan sebuah sumbangsih pemikiran/pengetahuan untuk masyarakat Banten,

untuk mewujudkan itu semoga tulisan ini juga bisa menjadi sebuah diskursus kedepannya terutama terkait dengan sosial, politik, dan budaya. Selain itu, alasan lain mengapa penulis memilih topik ini karena penulis memiliki kedekatan intelektual. Penulis pada dasarnya selalu tertarik untuk mempelajari dan mengkaji tentang sejarah politik. Penulis juga sudah membaca berbagai macam sumber seperti buku dan artikel yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Akhirnya, menjadi stimulus untuk penulis menambah khazanah pengetahuan, khususnya dalam sejarah politik. Untuk itu, penulis akhirnya mengambil topik tersebut untuk dilakukan sebuah penelitian.

*Kedua*, pengumpulan sumber atau *heuristik*. Sumber sejarah disebut juga sebagai data sejarah; data dari bahasa Inggris *datum* (bentuk tunggal) atau data (bentuk jamak); bahasa latin *daum* berarti “pemberian“, yang harus dikumpulkan sesuai jenis sejarah yang akan ditulis. Sumber-sumber yang sudah didapatkan penulis berupa buku dan jurnal ilmiah dengan melakukan pencarian sumber ke Perpustakaan Universitas Indonesia di Depok dan Perpustakaan Nasional di Jakarta, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten di Serang. Sumber tersebut diantaranya: buku yang berjudul “*Jawara Banten: Sebuah Kajian Sosial, Politik dan Budaya*“ karya Fahmi Irfani, “*Islam, Jawara, dan Demokrasi: Geliat Politik Banten Pasca-Orde Baru*“ karya Andi Rahman Alamsyah, dan “*Banten dalam pergumulan sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*“ karya Nina Lubis. Serta karya ilmiah berupa tesis karya Abrori Ahmad, “*Perilaku Politik Jawara Banten dalam Proses Politik di Banten*“.

*Ketiga*, kritik sumber. Setelah kita mengetahui secara persis topik kita dan sumber sudah dikumpulkan, tahap yang berikutnya adalah verifikasi, atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber. Menurut Kuntowijoyo (2013), kritik sumber atau verifikasi itu terbagi atas macam: (1) autentisitas, keaslian sumber, atau kritik ekstern; dan (2) kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern. Dalam penelitian ini, keduanya dilakukan oleh peneliti. Kritik intern yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan membandingkan semua sumber-sumber yang sudah dikumpulkan baik itu berupa buku, tesis, ataupun jurnal ilmiah. Dalam hal ini, tentu

saja tujuannya untuk mengetahui kebenaran dan kredibilitas sumber-sumber yang telah diperoleh. Kemudian, kritik ekstern yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa proses pengujian yang berfokus pada orisinalitas/autentisitas/keaslian sumber dengan mengamati dari fisik sumber-sumber yang telah diperoleh.

*Keempat*, interpretasi. Interpretasi atau penafsiran fakta dari sumber-sumber yang sering disebut sebagai subjektifitas. Sebagian benar dan sebagian salah, benar karena tanpa penafsiran sejarawan data tidak bisa berbicara. Adanya subjektivitas dalam penulisan sejarah itu harus diakui, tetapi untuk dihindari. Untuk itu peneliti dalam penelitian ini berusaha untuk menafsirkan/menginterpretasikan fakta-fakta yang telah diperoleh berdasarkan sumber-sumber yang sudah lolos verifikasi dengan se-objektif mungkin, dengan merekonstruksinya untuk menjadi suatu kisah sejarah yang utuh. Sumber-sumber yang sudah diverifikasi, seperti buku yang berjudul “*Islam, Jawara, dan Demokrasi*“, dan “*Banten dalam pergumulan sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*“. Berdasarkan penafsiran dari fakta-fakta yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.

*Kelima*, historiografi. Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Sebuah proses penyusunan fakta-fakta sejarah (yang telah diinterpretasi sebelumnya) dari berbagai macam sumber yang telah dipilih dalam sebuah penulisan sejarah. Sejarawan juga harus mempunyai batasan-batasan dalam menuliskan sejarah, seperti imajinasi yang digunakan oleh sejarawan untuk menemukan kembali pecahan *puzzle* yang tersebar harus dibatasi dengan berdasarkan metodologi. Seorang sejarawan juga harus ingat bahwa tulisannya bukan hanya penting bagi dirinya sendiri namun juga memiliki dampak bagi yang membacanya. Maka seorang sejarawan perlu mempertimbangkan struktur dan gaya penulisan agar orang lain mudah dalam memahaminya. Proses penulisan bertujuan untuk merangkai fakta-fakta yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh, logis, dan sistematis dalam bentuk narasi kronologis.

## 2. Bahan Sumber

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas berbagai macam literatur seperti buku dan jurnal ilmiah. Sumber-sumber yang berhasil diperoleh antara lain; buku *“Islam, Jawara, Demokrasi : Geliat Politik Banten pasca Orde Baru”* karya Andi Rahman Alamsyah, buku *“Banten dalam Pergumulan Sejarah; Sultan, Ulama, Jawara”* karya Nina Lubis, buku *“Pemberontakan Petani Banten 1888”* karya Sartono Kartodirdjo, buku *“JAWARA BANTEN: Sebuah Kajian Sosial, Politik, dan Budaya”* karya Fahmi Irfani, buku *“Oigarki dan Demokrasi: Kajian Sumber Daya Kekuasaan Kiai dan Jawara di Banten”* karya Ahmad Munjin. Selain itu, sumber primer didapat melalui dokumen resmi pilkada Banten tahun 2006 dari KPU Banten dan wawancara pribadi yang dilakukan dengan H. Abdurahman atau Kang Dur sebagai narasumber, selaku tokoh Jawara, keluarga Hj. Ratu Atut Chosiyah, dan sekjen DPP PPPSBBI Banten.

### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis akan membagi sistematika penulisan menjadi 5 bab, antara lain:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Dasar Penelitian
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Analisis
- E. Metode Penelitian dan Bahan Sumber
- F. Sistematika Penulisan

#### **BAB II JAWARA DALAM LINTASAN SEJARAH INDONESIA (1811 M – 1827 M)**

- A. Sejarah awal kemunculan para Jawara
- B. Jawara sebagai Bandit Sosial
- C. Jawara sebagai Elit Sosial

1. Perkembangan dan Transformasi Peran Sosial para Jawara
  2. Jaringan Sosial para Jawara
- D. Relasi Hubungan Kyai dengan Jawara
1. Jawara sebagai Murid Kyai
  2. Jawara sebagai Satuan Pengamanan Kyai

### **BAB III POLITIK JAWARA DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI (1970 M – 2000 M)**

- A. Jawara dan Rezim Orde Baru
1. Pembentukan Satkar Ulama (1970 M) dan Satkar Jawara (1971 M)
  2. Jawara sebagai mesin politik Golkar
  3. Kebijakan penyederhanaan partai-partai politik
  4. Loyalitas Jawara kepada rezim Orde Baru
- B. Orde Baru menjadi Masa Pemberdayaan Jawara
- C. Pembentukan Provinsi Banten dalam semangat Reformasi (2000 M)
- D. Jawara dan Pemerintah Lokal di Era Reformasi
1. Dominasi Jawara dalam Kekuasaan Politik
  2. Dominasi Jawara dalam Penguasaan Ekonomi

### **BAB IV PERANAN JAWARA DALAM PILKADA BANTEN TAHUN 2001 dan 2006**

- A. Pengaruh H. Tubagus Chasan Sohib Dalam Komunitas Jawara
- B. Dukungan Jawara kepada Hj. Ratu Atut Chosiyah di Pilkada Banten tahun 2001 dan 2006
- C. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tahun 2001
- D. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten langsung perdana pada tahun 2006

### **BAB V KESIMPULAN**